



Research



IRDH

# DESAIN PENDIDIKAN

## RESOLUSI KONFLIK



SUSI FITRIA DEWI • JUNAIDI INDRAWADI • SYAMSUDDIN ANAS  
ANDES HULFAREZA • NOSY MUTIA ANGRAINI • WELLA AYU NINGSIH

**DESAIN PENDIDIKAN RESOLUSI KONFLIK**

**SUSI FITRIA DEWI  
JUNAI DI INDRAWADI  
SYAMSUDDIN ANAS  
ANDES HULFAREZA  
NOSY MUTIA ANGRAINI  
WELLA AYU NINGSIH**

**CV. IRDH**

## **DESAIN PENDIDIKAN RESOLUSI KONFLIK**

Oleh : Susi Fitria Dewi  
Junaidi Indrawadi  
Syamsuddin Anas  
Andes Hulfareza  
Nosy Mutia Angraini  
Wella Ayu Ningsih  
Perancang sampul : Yorim N Lasboi  
Penata Letak : Agung Wibowo  
Penyunting : Cakti Indra Gunawan  
Yadi Syanurdi  
Panji Susanto  
Pracetak dan Produksi : Yohanes Handrianus Laka

Hak Cipta © 2019, pada penulis

Hak publikasi pada CV IRDH

Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan Pertama Desember, 2019

Penerbit CV IRDH

Anggota IKAPI No. 159-JTE-2017

Office: Jl. Sokajaya No. 59, Purwokerto

New Villa Bukit Sengkaling C9 No. 1 Malang

HP 081 333 252 968 WA 089 621 424 412

[www.irdhcenter.com](http://www.irdhcenter.com)

Email: [buku.irdh@gmail.com](mailto:buku.irdh@gmail.com)

ISBN: 978-623-7343-95-0

i-xiiiint + 62 hlm, 25 cm x 17.6 cm

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah diucapkan kehadiran Illahi karena atas izin-Nya buku desain Pendidikan Resolusi Konflik ini dapat diselesaikan. Buku ini dipersembahkan bagi para pelajar, mahasiswa, guru dan dosen yang ingin mempelajari mengenai konflik dan resolusi konflik. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai definisi konflik, tipologi konflik sosial yang terjadi di Indonesia serta resolusi konflik yang dilakukan. Selain itu buku kecil ini juga memuat tentang tantangan dan hambatan pendidikan resolusi konflik, peace building di sekolah, desain pendidikan resolusi konflik dan kecerdasan sosial dalam pendidikan resolusi konflik.

Meskipun materi yang disajikan tidak luas dan dalam, kelebihan buku ini menggunakan ilustrasi yang menarik agar lebih memudahkan bagi pembaca untuk memahaminya. Penulis berharap, para pembaca terinspirasi dalam mengembangkan desain pendidikan resolusi konflik melalui penulisan silabus dan hand out dalam berbagai mata pelajaran dan mata kuliah yang diberikan pada siswa dan mahasiswa. Terakhir penulis mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah bekerja keras, Dr Junaidi Indrawadi, Syamsuddin Anas, Andes Hulfareza, Nosy Mutia Angraini, Wella Ayu Ningsih serta tim ilustrasi Yadi Syanurdi dan Panji Susanto. Tanpa kerjasama semua pihak, buku ini mustahil dapat diwujudkan. Terima kasih kepada Kemenristek Dikti RI atas Hibah Penelitian Tesis Magister 2019 sehingga tim dapat membiayai proses penerbitan buku ini.

Susi Fitria Dewi

Desember 2019

---

SUSI FITRIA DEWI  
JUNAIIDI INDRAWADI  
SYAMSUDDIN ANAS  
ANDES HULFAREZA  
NOSY MUTIA ANGRAINI  
WELLA AYU NINGSIH

iii

---

DESAIN PENDIDIKAN  
RESOLUSI KONFLIK

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>IV</b>
<b>SKEMA DESAIN PENDIDIKAN RESOLUSI KONFLIK</b> .....	<b>1</b>
1. Analisis Tujuan dan Karakteristik Isi Pendidikan Resolusi Konflik .....	1
2. Analisis Sumber Belajar .....	1
3. Penetapan Tujuan Belajar dan Isi pembelajaran Pendidikan Resolusi Konflik.....	2
4. Analisis Karakteristik Isi Pendidikan Resolusi Konflik.....	2
5. Penetapan Strategi Penyampaian .....	3
6. Strategi Pengorganisasian .....	3
7. Penetapan Strategi Pengelolaan .....	4
8. Pengukuran Hasil Pembelajaran.....	4
<b>DESKRIPSI KARAKTERISTIK ISI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RESOLUSI KONFLIK</b> .....	<b>6</b>
1. Pemahaman Konflik.....	6
2. Tipologi Konflik dan Resolusi Konflik Sosial di Indonesia .....	9
3. Tantangan dan Hambatan Pendidikan Resolusi Konflik di Indonesia	23
4. Desain Pendidikan Resolusi Konflik .....	28
5. Penciptaan <i>Peace Building</i> di Sekolah .....	36
6. Kecerdasan Sosial dalam Pendidikan Resolusi Konflik.....	39
<b>KESIMPULAN</b> .....	<b>44</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>45</b>

---

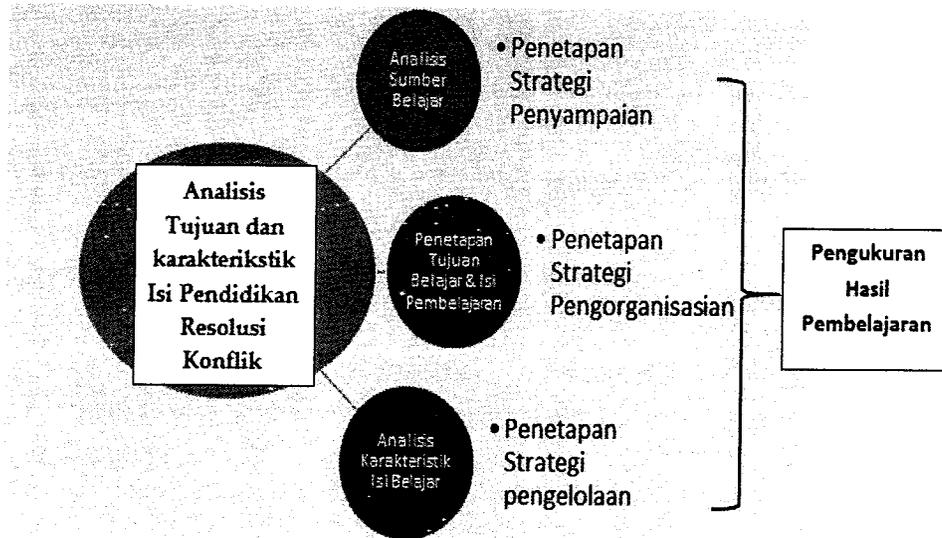
SUSI FITRIA DEWI  
JUNAIDI INDRAWADI  
SYAMSUDDIN ANAS  
ANDES HULFAREZA  
NOSY MUTIA ANGRAINI  
WELLA AYU NINGSIH

**DAFTAR PUSTAKA..... 46**  
**GLOSARIUM ..... 50**  
**INDEKS ..... 52**  
**TENTANG PENULIS..... 54**

---

**SUSI FITRIA DEWI  
JUNAI DI INDR AWADI  
SYAM SUDDIN ANAS  
ANDES HULFAREZA  
NOSY MUTIA ANGRAINI  
WELLA AYU NINGSIH**

## SKEMA DESAIN PENDIDIKAN RESOLUSI KONFLIK



### 1. Analisis Tujuan dan Karakteristik Isi Pendidikan Resolusi Konflik

Sebuah desain pendidikan resolusi konflik harus memuat tiga hal; pertama analisis sumber belajar, penetapan tujuan belajar, Isi materi belajar, serta analisis karakteristik isi belajar. Keberhasilan memenuhi ketiga elemen ini dapat menjadi tolak ukur bagaimana pengukuran hasil belajar yang dilakukan oleh guru atau dosen kepada siswanya. Berikut beberapa catatan dalam mendesain pendidikan resolusi konflik.

### 2. Analisis Sumber Belajar

Sumber belajar yang digunakan untuk pendidikan resolusi Konflik adalah; internet, buku, jurnal, modul, narasumber, video, ensiklopedia, kamus, perpustakaan, dan lingkungan. Guru dan Dosen

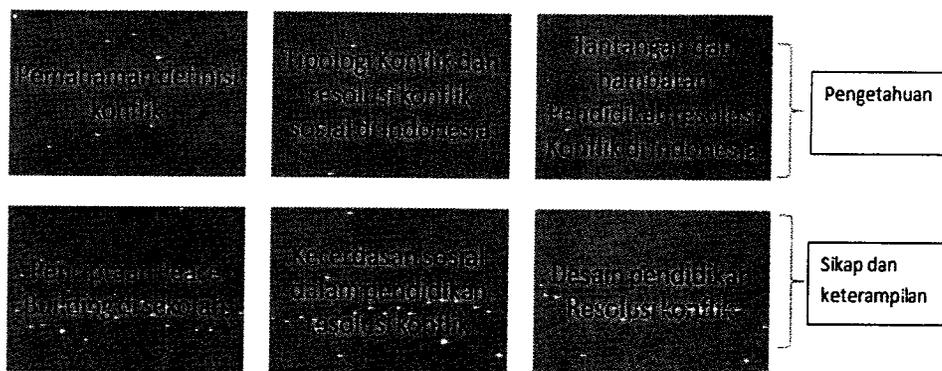
dapat memilih beberapa materi dan kasus dari berbagai sumber diatas. Untuk kasus konflik, penulis memilih jurnal, sedangkan untuk materi yang berisi konsep dan teori menggunakan buku referensi. Untuk level mahasiswa, penulis menugaskan mereka untuk mewawacarai langsung para pihak yang sedang mengalami konflik untuk menjadi sumber belajar sekaligus praktek cara berkomunikasi yang baik serta mengasah kepekaan terhadap realitas konflik.

### **3. Penetapan Tujuan Belajar dan Isi pembelajaran Pendidikan Resolusi Konflik**

Tujuan belajar ada tiga; pertama memberi pengetahuan mengenai konflik secara positif, kedua memberikan keterampilan problem solving dan keempat menanamkan sikap dan kecerdasan sosial dalam mencegah dan menyelesaikan konflik. Buku ini mendeskripsikan tipologi konflik sosial di Indonesia dan menghasilkan desain pendidikan resolusi konflik. Desain ini dapat dikembangkan menjadi materi pembelajaran oleh guru, dosen bidang ilmu sosial untuk mendidik anak murid serta mahasiswa memahami resolusi konflik dan mampu tampil sebagai problem solving.

### **4. Analisis Karakteristik Isi Pendidikan Resolusi Konflik**

Penulis menawarkan 6 materi yang harus ada dalam pendidikan resolusi konflik. Keenamnya saling berkaitan serta mendukung terhadap kemampuan siswa atau mahasiswa sebagai pencegah konflik dan problem solving dalam berbagai kasus konflik di sekitarnya.



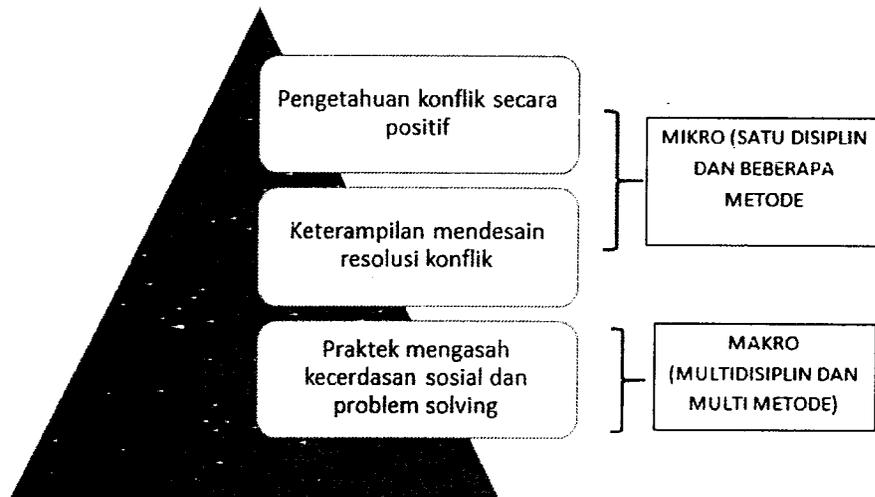
## 5. Penetapan Strategi Penyampaian

Terdapat beberapa metode digunakan dalam pendidikan resolusi konflik, mulai dari ceramah, team teaching, sumbang saran, demonstrasi, antardisiplin, inkuiri, satuan pengajaran, advokasi, berdiskusi, kerja kelompok, penemuan melalui kerja lapangan, penyajian kasus, tutorial, modul, pengajaran terpadu, kasuistik, problem solving, simulasi, discovery, ekspository. Namun metode yang biasa penulis terapkan adalah kerja kelompok sambil berdiskusi agar semua siswa memiliki tanggung jawab untuk berperan serta dalam capaian pembelajaran. Untuk level mahasiswa, telah dapat digunakan kerja lapangan untuk melakukan wawancara dan observasi lapangan.

## 6. Strategi Pengorganisasian

Penetapan Strategi Pengorganisasian Pendidikan Resolusi Konflik dilakukan dengan membuat urutan (*sequencing*) dan *synthesizing* fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan dengan isi pembelajaran, yang terbagi menjadi dua macam yaitu mikro (mengacu kepada metode untuk pengorganisasian isi pembelajaran yang berkisar pada satu konsep atau prosedur atau prinsip) dan makro

(mengacu kepada metode untuk pengorganisasian isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep atau prosedur atau prinsip). Berikut gambaran untuk pendidikan resolusi konflik:



## 7. Penetapan Strategi Pengelolaan

Penetapan Strategi Pengelolaan Pendidikan Resolusi Konflik merupakan cara untuk menata interaksi antara dosen dan mahasiswa tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian mana yang digunakan selama proses pembelajaran. Penetapan Strategi pengelolaan ini terbagi menjadi empat macam yaitu: penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran, pembuatan catatan kemajuan siswa, pengelolaan motivasional, dan kontrol belajar.

## 8. Pengukuran Hasil Pembelajaran

Pengukuran Hasil Pembelajaran Pendidikan Resolusi Konflik memiliki tiga prinsip pengukuran, yaitu: pertama harus ditentukan dan dijelaskan apa yang akan diukur, kedua, teknik pengukuran dipilih

berdasarkan kegunaan pengukuran, dan ketiga, penilaian yang kompeherensif. Gabungan bermacam-macam teknik pengukuran dan pemakaian yang tepat dari teknik-teknik pengukuran menghasilkan kesadaran bahwa masing-masing teknik tersebut mempunyai keterbatasan dan keunggulannya.

Pengukuran Hasil Pembelajaran Pendidikan Resolusi Konflik memiliki tiga jenis instrument yang dibedakan dari kawasan belajarnya yaitu: apabila yang diukur hasil belajar kognitif maka pengukuran akan dilakukan dengan mengetes atau menguji mahasiswa, apabila yang diukur hasil belajar bidang sikap maka pengukuran dilkaukan dengan menggunakan teknik non-tes, dan dalam bidang psikomotor diukur dengan tes perbuatan dan non-tes. Berikut gambaran pengukuran hasil belajar:

Indikator penilaian	Excellent	Very Good	Good	Average
Definisi Konflik dan beberapa perspektif tentang arti konflik				
Daya kritis, nalar terhadap kasus				
Desain Problem solving (win-win solution)				
Komunikatif skill dan stabilitas emosi				
Kerjasama dan kolaborasi skill				

## DESKRIPSI KARAKTERISTIK ISI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RESOLUSI KONFLIK

### 1. Pemahaman Konflik

Pada dasarnya individu atau kelompok tidak terlepas dari konflik. Konflik terjadi karena setiap individu dalam masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda sehingga dalam pemenuhan kebutuhannya akan menimbulkan konflik. Maraknya konflik di tengah masyarakat diasumsikan karena dua hal; *pertama*, masyarakat belum memiliki kemampuan untuk menegosiasikan kepentingan dan kebutuhannya secara baik, *kedua* kebijakan negara yang mengatur harmonisasi dan penyelesaian konflik belum mampu melindungi hak-hak masyarakat. Akibatnya masyarakat menggunakan kekerasan dalam mengatasi konflik yang dihadapinya. Masyarakat membenarkan melakukan tindak kekerasan, dengan alasan mempertahankan hak milik maupun harga dirinya. Situasi ini mengganggu keamanan dan kenyamanan kehidupan masyarakat, baik secara sosial, budaya, ekonomi, hukum bahkan politik (Dewi, 2010)

Hipotesis penulis, akar konflik tidak terletak objek atau benda yang diperebutkan, tapi pada mentalitas manusia dan masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap benda tersebut. Faktor yang mendorong terjadinya suatu konflik telah dituliskan oleh (Mohd. Foad Sakdan, 2005). Ia menyatakan terdapat **enam faktor** yang menyebabkan konflik, yaitu faktor biologi, psikologi, demografi, geografi, sosioekonomi dan budaya. Menurut faktor biologi, yakni teori *struggle for life* individu yang kuat dan kaya akan menindas individu yang

lemah dan miskin (Thomson, 1999). Sedangkan menurut teori *racialist* orang kulit putih akan diperlakukan istimewa dibandingkan orang kulit hitam (Dobratz, 2011). Menurut faktor psikologi, konflik terjadi karena pertentangan personal *introvert* dengan *ekstrovert* (Furnham & Allass, 1999). Keberadaan orang dengan personaliti *concepiscentia dominandi*, sifat dominasi seseorang yang memaksa, keras dan ganas akan menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan yang didominasi (Calcagno, 2010).

Faktor demografi, ada lima hal penyebab konflik; menurut Teori Malthus, kawasan yang padat mempunyai kasus perkelahian lebih tinggi dibandingkan kawasan desa. Orang muda usia seperti pelajar, lebih tinggi kadar konfliknya dibandingkan orang tua karena lebih emosional, sukar mengawal nafsu dan mudah marah, kurang dari segi pengalaman dan cenderung menggunakan kata-kata kasar. Golongan laki-laki mempunyai konflik lebih tinggi berbanding golongan perempuan, sebab wanita lebih penyabar. Negara maju mempunyai konflik lebih tinggi berbanding negara berkembang, sebab negara maju lebih kompetitif, perniagaan lebih banyak dan kompleks. Negara yang menerima migrasi lebih tinggi konfliknya karena penghijrah dan penghuni asal sama-sama mempertahankan budaya dan nilai adat, serta anggapan bahwa pendatang lebih rendah statusnya dibandingkan masyarakat asal (Neumayer, 2007).

Faktor berikutnya geografi, teori psigeografikal menyatakan kawasan yang tanahnya subur mempunyai kadar konflik tinggi. Kawasan panas menyebabkan suhu manusia lebih tinggi sehingga mudah marah. Teori Pulau Montesqieu, tanah yang luas dan datar

mempunyai kadar konflik lebih tinggi daripada kawasan lembah dan kawasan oasis. Hal ini disebabkan tanah yang datar memiliki penduduk yang padat, sesak dan memungkinkan konflik terjadi. Konflik di kota lebih tinggi daripada di desa. Sistem komunikasi yang canggih dan cepat menyebabkan interaksi dengan emosi yang sukar dikawal. Pemanfaatan sungai, air, lokasi yang strategis mengakibatkan konflik apabila sumber tersebut diperoleh dengan cara yang tidak disenangi oleh kedua pihak tersebut (Williamson, 2005)

Berikutnya faktor sosioekonomi, dengan merujuk teori Karl Marx konflik terjadi apabila golongan pemodal memeras dan mengeksploitasi golongan pekerja (Collins, 2019). Faktor budaya, menurut (Huntington, 1993), yakni perbezaan entitas budaya di kalangan masyarakat dunia adalah konflik yang paling berbahaya dibandingkan konflik lainnya kerana mempengaruhi faktor sosial dan ekonomi. Artinya, perang saudara dan konflik antar etnik telah berpengaruh terhadap perubahan kebijakan politik dan ekonomi suatu bangsa (Huntington, 1993). Terakhir faktor ideologi, yakni persinggungan antara faham politik yang berbeza memungkinkan berlakunya konflik di antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya. Konflik terjadi apabila sebuah kelompok atau negara mencoba menyebarkan ideologi mereka pada kelompok atau negara lain (Mohd. Foad Sakdan, 2005).

Berbagai tulisan diatas menjelaskan bahwa konflik ternyata ada dalam diri manusia, hasil interaksi dengan orang lain dan masyarakat sekitarnya. Konflik yang ada dalam diri manusia berasal daripada (1) sifat menindas golongan kuat kepada yang lemah dan (2) sifat memeras

yang kaya kepada yang miskin. Interaksi seperti ini sengaja dilakukan guna memuaskan salah satu pihak. Mentalitas konflik ini memerlukan suatu upaya melalui pendidikan, yakni menciptakan desain pendidikan resolusi konflik. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimanakah tipologi konflik sosial yang terjadi di Indonesia? Dan bagaimanakah bentuk desain pendidikan resolusi konflik yang mampu untuk mengawal sikap konflik yang telah wujud dalam diri manusia? Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tipologi konflik sosial di Indonesia dan menghasilkan desain pendidikan resolusi konflik. Desain ini dapat dikembangkan menjadi materi pembelajaran oleh guru, dosen bidang ilmu sosial untuk mendidik anak murid serta mahasiswa memahami resolusi konflik dan mampu tampil sebagai problem solving

## **2. Tipologi Konflik dan Resolusi Konflik Sosial di Indonesia**

Di Indonesia, terdapat tiga jenis konflik sosial yang menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat; (1) konflik antar pemuda/pelajar (2) konflik sumber daya alam dan (3) konflik antar etnis. Berikut penjelasan ketiga jenis konflik diatas:

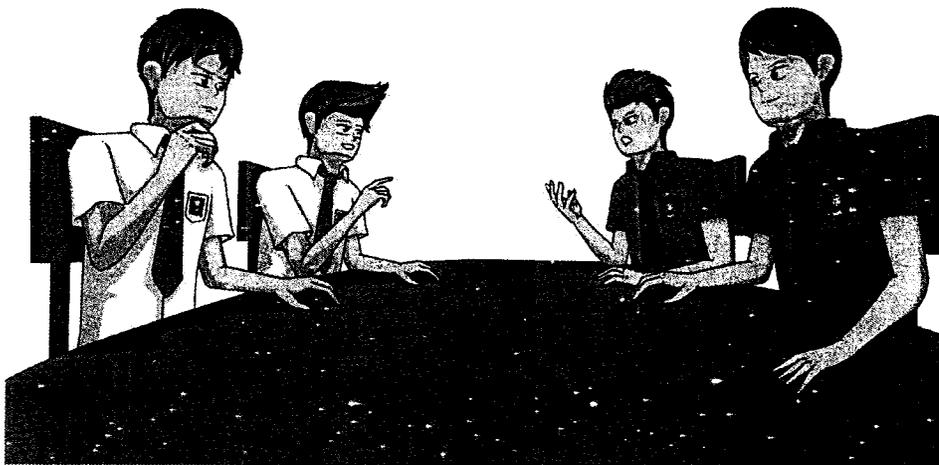
### a. Konflik dan Resolusi Konflik Antar Pelajar



Jumlah kasus konflik antar pelajar mengalami kenaikan dari masa ke masa. Konflik ini disebabkan oleh ketidakmampuan siswa menyelesaikan konflik secara konstruktif dan interpersonal sehingga menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian diantara pelajar. Peristiwa konflik ini kemudian ditularkan pada pelajar lainnya sehingga terjadilah tawuran antar pelajar.

Pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi konflik antar pelajar? Salah satu strategi resolusi konflik antar pelajar adalah membangun komunitas untuk bekerjasama dengan organisasi atau institusi sekolah lain yang memiliki komitmen menciptakan perdamaian (Fisher, 2000). Strategi ini berhasil meredam konflik antar pelajar, sebut saja NGO *Mahabbah Institut For Peace and Goodness* (MIPG) yang beranggotakan pelajar dan mahasiswa,

NGO ini didirikan di kota Makassar memiliki 14 tujuan dalam rangka menciptakan dan memelihara perdamaian dunia (Indo Santalia, 2018). Begitu juga dengan *Komunitas Peace Generation* di 32 kota di Indonesia, memiliki website resmi dan sponsor tetap untuk mendukung perdamaian lintas agama dan kultural. Khusus *Peace Generation* yang di Jawa Barat telah menghasilkan 12 nilai perdamaian dalam bentuk modul, yang diajarkan di sekolah dan berbagai komunitas pelajar dan pemuda di Bandung (Ayi & Rusyana, 2012). Dua contoh komunitas ini bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan perdamaian.



Menarik apa yang dilakukan *Peace Camp Komunitas Young Interfaith*, kelompok ini mengadakan kegiatan kemping bersama untuk membangun kesepahaman antara mahasiswa muslim dan kristen Yogyakarta (Hidayati, 2017). Selain mengadakan kemping

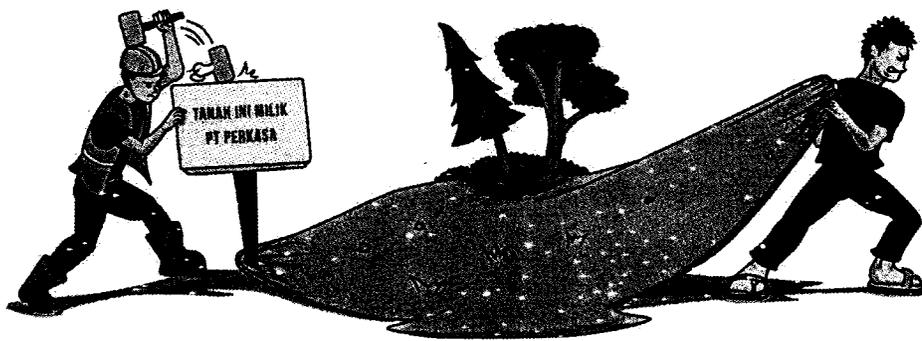
bersama, komunitas *Young Interfaith Peacemaker Community* (YIPC) melakukan dialog menggunakan model *interfaith dialog*, yakni berdasarkan Al-Quran dan Al Kitab (Adila, 2019). Sebuah organisasi internasional non pemerintah “*Encompass Trust*” berupaya mensosialisasikan nilai-nilai perdamaian kepada generasi muda internasional. Menggunakan perspektif pendidikan multikultural organisasi ini melakukan kerjasama dengan 2000 pemuda dari seluruh penjuru dunia. Salah satu program terkenalnya adalah *Journey Of Understanding* (JOU), adalah bentuk resolusi konflik yang menghasilkan kesepakatan diantara dua pihak (Mattaro, 2017).

Sebuah sekolah di kota Surabaya, yakni Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Xin Zhong justru mengintegrasikan nilai-nilai *peace education* ke dalam dua mata pelajaran, yakni pendidikan agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Hal yang sama dilakukan oleh Pondok Pesantren A-Qodir Sleman Yogyakarta. Di pondok ini santri diberi pengetahuan terkait radikalisme dan cara menangkalnya lalu mengajak para santri melakukan aksi sosial di tengah masyarakat. Para Kyai menggunakan pendekatan **bina-damai** untuk menanamkan nilai-nilai perdamaian kepada para santrinya (Mantu, 2015)

#### **b. Konflik dan Resolusi Konflik Sumber Daya Alam**

Konflik sumber daya alam adalah perbedaan keyakinan, kepentingan, keinginan, keperluan, tujuan, nilai, kekuasaan, status, sumber daya, tingkah laku, dan sasaran antara individu atau kelompok satu dengan lainnya terkait pemanfaatan lahan dan

isinya yang saling dipertentangkan (Dewi, 2017). Konflik lahan antar masyarakat sarat dengan perasaan kecewa dan prasangka sehingga sukar dilakukan negosiasi dan mediasi akibat ketidakcocokan dalam berkomunikasi. (Dewi, 2014). Konflik dengan objek lahan merupakan isu konflik terbesar sepanjang zaman dikarenakan fungsinya yang strategis sebagai tempat produktivitas pertanian, eksplorasi pertambangan serta kegiatan pembangunan, (Dewi, 2006), (Dewi, 2013).



Arsadi (I Putu Prana Suta Arsadi & Artha, 2018) mengidentifikasi terdapat empat perilaku pemicu konflik lahan; pertama, klaim kepemilikan tanah oleh masyarakat akibat sertifikat ganda. Kedua, pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak akibat tradisi lisan dalam membuat kesepakatan perjanjian dan batas tanah. Tradisi lisan telah mengakibatkan ketidakjelasan siapa

pemilik tanah dan dimana lokasi tanah, sehingga memunculkan ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kedua pihak (Dewi, 2010). Ketiga, pelanggaran hukum adat tentang larangan penjualan tanah adat, keempat, ketidakadilan dalam ganti rugi pembebasan tanah.



Rahmawan (Dicky Rachmawan, 2016) menuliskan, kepentingan pemerintah untuk mengadakan pembangunan waduk diatas lahan milik rakyat telah memicu konflik karena hilangnya mata pencarian serta terkuburnya identitas sosial dan budaya masyarakat setempat. Begitu juga dengan hasil penelitian Maladi (Maladi, 2012), pergerakan masyarakat dalam mempertahankan

tanahnya disebabkan keberpihakan negara terhadap kaum kapitalis. Posisi masyarakat sebagai pihak yang tidak berdaya telah memicu konflik dan demonstrasi terhadap perusahaan-perusahaan besar yang dilindungi negara. Hal menarik disampaikan oleh Alting (Alting, 2011) konflik antara masyarakat dengan perusahaan diakibatkan ganti rugi yang tidak memadai serta keberpihakan pemerintah kepada investor.



Beberapa hasil penelitian yang membahas strategi maupun resolusi konflik lahan adalah Rahardjanto (Rahardjanto, 2010), yang menggunakan metode *smart solution* dan metode partisipatif akomodatif pada konflik pembagian air. Begitu juga dengan Wicaksono (Dian Agung Wicaksono, 2018) yang lebih

mengedepankan wewenang dan tanggung pemerintah daerah dalam menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelesaian sengketa berbasis adat sebagai strategi pengelolaan konflik. Martoyo (Martoyo, Ahmad Junaidi, 2017) menuliskan tentang strategi pemberdayaan hukum tanah kepada masyarakat sebagai solusi mencerdaskan rakyat terkaitnya haknya tentang tanah. Menarik apa yang disampaikan Gamin (Gamin, Nugroho & Kartodihardjo, 2014) ia menuliskan pengelolaan konflik dapat dilakukan apabila telah memetakan gaya sengketa. Gaya sengketa merupakan analisis terhadap aktor konflik, kepentingan dan pengaruh. Berbagai strategi pengelolaan konflik lahan diatas menunjukkan, diperlukan pendekatan alternatif untuk menangani perselisihan dengan objek lahan secara efektif dan tanpa kekerasan. Fisher (S Fisher, DI Abdi, J Ludin, R Smith, S Williams, 2000).



Berikut hasil desain strategi pengelolaan konflik lahan:

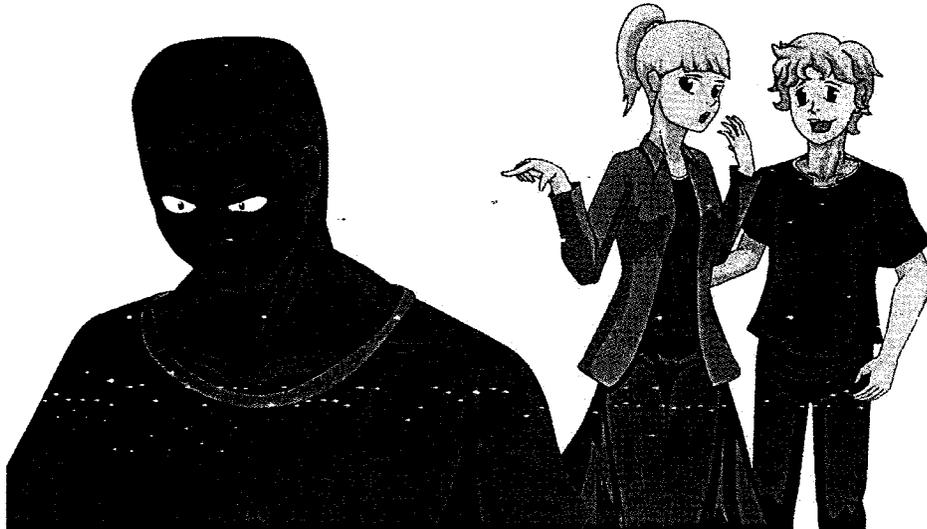
Strategi pengelolaan konflik Lahan

<b>Konflik lahan</b>	<b>Resolusi Konflik</b>
Ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda	Menampung persepsi dan pengertian di antara kelompok yang berlawanan
Posisi yang tidak selaras	Pertemuan informal diantara kedua pihak yang saling bertikai untuk memulai restrukturisasi masyarakat
Terhalangnya pemenuhan kebutuhan dasar	Menyelenggarakan pertemuan untuk membicarakan isu-isu ekonomi dan peluang kerjasama ekonomi
Identitas yang terancam	Menyelenggarakan pertemuan untuk membicarakan isu-isu sosial budaya dan peluang kerjasama budaya
Ketidakcocokan dalam berkomunikasi	Mengundang meditor untuk membicarakan kembali kepentingan dan kebutuhan para pihak
Ketidaksetaraan sosial, budaya dan ekonomi	Menampung persepsi dan pengertian dari kelompok marginal untuk diangkat menjadi isu bersama yang harus diperjuangkan.

Sumber : Author

### c. Konflik dan Resolusi Konflik Antar Etnis

Konflik antar etnis diteliti oleh Paramita dan Carissa, menemukan bahwa konflik antar etnis disebabkan stereotype dan etnosentrisme terhadap etnis lainnya. Sukar menerima perbedaan, tidak adanya toleransi, tidak adanya saling menghargai, serta hambatan bahasa (Paramita & Carissa, 2018) Hal ini diperkuat oleh M.Lutfi yang menyatakan konflik berakar dari kesulitan adaptasi dari etnis pendatang di daerah etnis setempat dikarenakan setiap individu atau kelompok lebih mengedepankan identitas mereka. Namun konflik antar etnis seringkali disebabkan sikap merendahkan identitas pihak lainnya sehingga menunculkan sikap semena-mena (Luthfi, 2018). Indonesia, sebagai masyarakat berbudaya memiliki kearifan lokal dalam mencegah konflik antar etnis melalui tradisi penerimaan etnis lain untuk menjadi bahagian dari sukunya.



Rahman (Malik, 2016) menyatakan di Indonesia, masyarakat dari etnis Minangkabau memiliki mekanisme terbaik untuk menjaga kerukunan antar etnis melalui tradisi Malakok. *Malakok* (menempel) adalah sebuah tradisi yang dimiliki oleh etnis Minangkabau dalam menerima kedatangan etnis lain. Fitri (Eriyanti, 2016) menuliskan *Malakok* juga dipraktikkan oleh etnis lain seperti *berkedim* di negeri Sembilan Malaysia. Etnis batak pun memiliki mekanisme serupa dengan sebutan *Membeli Marga*. Sedangkan Etnis Aceh menyebutnya dengan *Peuseujuk*. Terdapat tiga tujuan malakok; (1) keinginan etnis lain untuk menempati wilayah etnis Minangkabau dalam waktu yang lama, (2) keinginan etnis lain untuk mendapatkan pengakuan sebagai bagian sebuah suku dari etnis Minangkabau dan (3) keinginan laki-laki etnis lain untuk menikah dengan perempuan etnis Minangkabau (Hafizah, 2017).

Untuk dapat memperoleh tiga hak baru tersebut sekelompok etnis pendatang harus mau memenuhi syarat dan ketentuan dalam tradisi malakok. Hafizah (Hafizah, 2017) menuliskan syarat yang harus dipenuhi etnis pendatang adalah memberikan 2 – 5 emas, yang diisikan ke dalam carano bersama dengan daun sirih kepada penghulu suku. Menyembelih seekor hewan (kerbau atau sapi) untuk di masak dan di konsumsi bersama masyarakat setempat. Setelah syarat ini diserahkan, maka seluruh penghulu suku akan menyatakan bahwa seseorang atau sekelompok orang telah menjadi bagian etnis Minangkabau dengan bentuk hubungan *tali ameh* (tali emas), dan ia dipanggil kemenakan. Fitri menuliskan (Eriyanti, 2016) bagi individu atau

kelompok yang *malakok* memiliki kewajiban bersumpah setia dan menjaga kehormatan suku. Etnis pendatang akan mengalami akulturasi budaya sebab menggunakan bahasa etnis setempat dan mengikuti norm-norma yang berlaku (Eriyanti, 2016).



*Malakok* tidak hanya dilakukan oleh laki-laki etnis pendatang, tetapi juga dapat dilakukan oleh perempuan etnis pendatang. Hafizah (Hafizah, 2017) menuliskan, ada tiga tahapan dalam tradisi *malakok*; *pertama* ayah dari si anak yang akan “*dilakokkan*” harus mendatangi penghulu suku untuk menyampaikan maksud tujuannya. *Kedua*, penghulu suku akan memberikan sejumlah syarat dan ketentuan yang harus diikuti oleh keluarganya. *Ketiga* melaksanakan upacara *malakok* di balai adat. Kelanjutan dari *malakok* adalah dilangsungkannya perkawinan

dengan seorang perempuan atau laki-laki dari suku yang menerimanya. Perkawinan yang didahului oleh tradisi malakok lebih dijaga oleh penghulu suku, sebab memiliki pengaruh terhadap hubungan antar etnis. Konflik yang terjadi dalam rumah tangga harus secepatnya diselesaikan dengan penghulu suku mereka. Inilah point penting tradisi malakok sebagai strategi adaptasi budaya dan pencegah konflik antar etnis. *Malakok* berfungsi memperkuat struktur sosial dan mewujudkan harmonisasi sosial (Eriyanti, 2016).

Hafizah (Hafizah, 2017) menuliskan apabila etnis pendatang tidak mau atau enggan mengikuti tradisi malakok, maka terdapat konsekuensi negatif; *pertama*, tidak boleh menikahi perempuan Minangkabau. *Kedua*, tidak dapat mengikuti musyawarah adat. *Ketiga* tidak mendapat bantuan atau perlindungan dari penghulu suku apabila mendapatkan masalah. Fitri (Eriyanti, 2016) menegaskan malakok telah menjadi keharusan bagi etnis pendatang sains agar dapat diterima oleh masyarakat adat Minangkabau.

Ketiga jenis konflik sosial ini memiliki sebab, dampak dan resolusi yang berbeda, namun memiliki pola akar konflik yang sama yakni; (1) Kerjasama tidak harmonis, (2) Masing-masing pihak ingin saling mengalahkan, (3) Kekerasan yang merugikan (4) Tidak memiliki keterampilan interpersonal (6) Tidak mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. Berikut hasil analisis yang menjelaskan peta akar konflik sosial di Indonesia:

Peta Akar Konflik Sosial di Indonesia



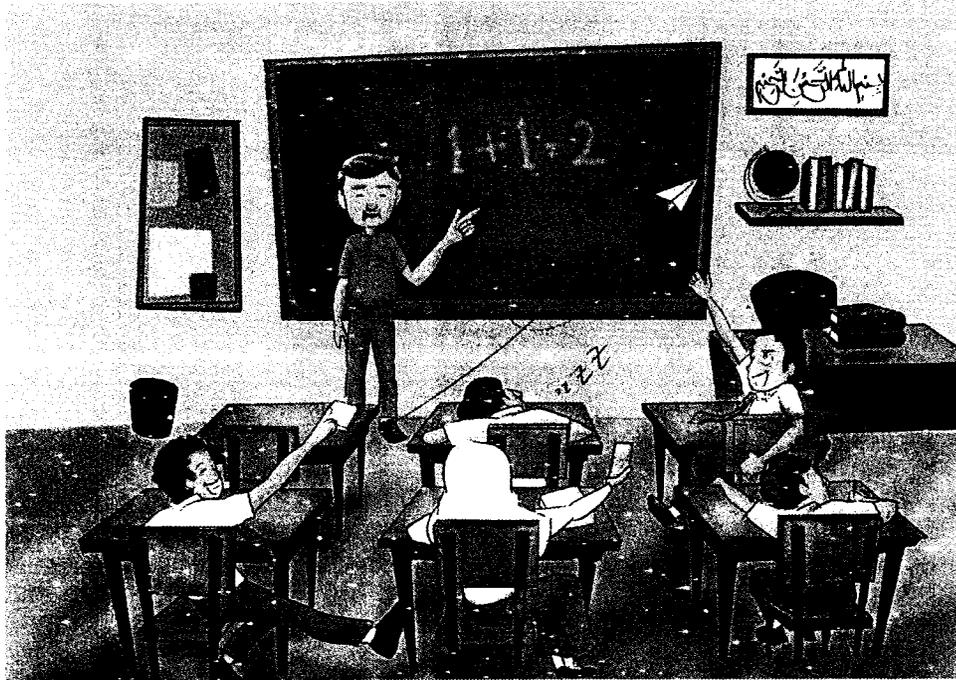
Sumber : Author

Keseluruhan konflik ini memerlukan resolusi konflik dengan cara yang demokratis, artinya memberi kesempatan pada pihak yang berkonflik menyelesaikan sendiri atau melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil serta tanpa kekerasan. Oleh karena itu diperlukan program pendidikan resolusi konflik dengan visi siswa mampu mencegah dan mengatasi konflik. Adapun misi yang ingin dicapai adalah (1) siswa mampu memahami konflik (2) siswa mampu mengendalikan emosi (3) siswa mampu mengatasi konflik secara konstruktif. Tujuan dari pendidikan resolusi konflik adalah menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Pendidikan Resolusi Konflik

ini merupakan keterampilan yang akan terpakai seumur hidup (long life learning) sebagai konsekwensi interaksi yang dilakukan individu dan kelompok. Namun demikian untuk dapat mencapai visi, misi dan tujuan pendidikan resolusi konflik, sekolah dan kampus harus dapat menciptakan iklim belajar yang baik, nyaman dan kondusif.

### **3. Tantangan dan Hambatan Pendidikan Resolusi Konflik di Indonesia**

Beberapa hasil penelitian menunjukkan, telah banyak dilakukan program intervensi sejenis pendidikan resolusi konflik seperti social emotional learning, pelatihan mediasi oleh Pusat mediasi Nasional (PMN). Sebuah mata pelajaran yakni Ilmu Pengetahuan Sosial yang diajarkan di sekolah mulai dari level Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi memuat konten pendidikan resolusi konflik seperti cooperative learning, social action, problem solving, group skill, democratic and human values. Namun menurut (Maftuh, 2010) guru masih menekankan pada transfer fakta, konsep dan teori resolusi konflik sehingga keterampilan menjadi terabaikan Akibatnya anak menjadi pintar tapi tidak mampu berinteraksi dan berkomunikasi sosial dengan baik, kurang peka dan kurang berempati terhadap perasaan orang dan kurang mampu melakukan praktik nyata membantu menyelesaikan masalah sosial secara konstruktif.



Hal yang sama dituliskan oleh (Salsabila, 2017) salah satu pendidikan yang memberikan pemahaman nilai perdamaian adalah mata pelajaran Agama. Pendidikan Islam sesungguhnya telah memuat konten tentang pentingnya perdamaian, sebagaimana yang dituliskan dalam salah surat dalam Al Quran yakni Al Hujurat (13), yang menyatakan bahwa Tuhan menciptakan keragaman suku dan budaya di dunia ini untuk saling mengenal, belajar, bersinergi dan berkontribusi positif untuk perdamaian bersama. Islam melarang melakukan diskriminasi, sub ordinasi dan alienasi terhadap berbagai kelompok masyarakat. Bahkan Pendidikan Islam telah mampu merumuskan pendidikan resolusi konflik melalui lima metode; (1) metode ta;aruf, yakni saling mengenal diantara masyarakat dunia untuk saling menghormati dan bekerjasama (2) metode takrim, yakni toleran terhadap agama yang berbeda dengan tidak memaksakan urusan

aqidah, sebagaimana dituliskan dalam surat Al Kafirun (3) metode Fastabiqul Khairat, yakni suruhan agama untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan, meningkatkan kualitas diri demi prestasi gemilang (4) husnuzhan, yakni berbaik sangka terhadap terhadap aktivitas sosial antar umat beragama (5) metode Islah, yakni mencari titik temu dan jalan keluar yang baik dalam setiap perselisihan melalui klarifikasi dari berbagai pihak yang bersengketa (Ulya, 2016).

Pendidikan multikultural yang dipercaya sebagai solusi terbaik dalam mendidik siswa untuk tampil sebagai resolving conflict, mengalami persoalan yang sama dengan IPS. Guru hanya mampu mentransfer pengetahuan kepada peserta didik sebatas tentang kelompok kultural. Namun belum sampai pada tahap meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang penyelesaian konflik. Pendidikan multikultural mengajarkan bagaimana menghargai perbedaan, serta memperkenalkan kepada siswa bahwa dunia adalah tempat untuk multikulturalisme mulai dari perbedaan rasial, golongan sosial-ekonomi, gender, bahasa, budaya, jenis kelamin dan ketunaan (Somantrie, 2011). Namun siswa belum sampai pada peningkatan toleransi budaya, agar dapat berfikir kritis masalah rasisme, seksisme dan asek-spek represif lainnya, karena tidak bertemu langsung dengan individu dengan latar belakang budaya yang berbeda.

Nilai penting lainnya adalah bahwa Islam juga menyuruh manusia untuk damai dengan dirinya sendiri sebelum mendamaikan orang lain. Untuk dapat damai dalam dirinya sendiri syarat yang harus dipenuhi adalah tunduk kepada kitab suci. Islam meyakini ketundukan kepada kitab suci akan melahirkan pribadi yang mampu berbuat adil,

tidak diskriminasi menegakkan kebenaran dan kesetaraan. Pribadi seperti ini merupakan hasil pendidikan sejak usia dini yakni melalui pendidikan multikultural (Pettalongi, 2013). Hal ini juga penting disampaikan pada mata pelajaran Agama Islam di berbagai tingkat pendidikan, untuk menunjukkan bahwa umat Islam konsisten dalam mewujudkan perdamaian dunia (Ulya, 2016).

Ketertinggalan siswa dari pembelajaran resolusi konflik harus secepatnya diatasi sebab pergesekan kepentingan ekonomi dan politik semakin nyata pada abad 21 ini. Pada abad inilah terjadi hubungan individu dan kelompok dengan individu dan kelompok lainnya, lintas negara, budaya dan agama. Sehingga konflik sosial sering terjadi karena mis-komunikasi dan interaksi diantara dua pihak yang menyinggung perasaan, mengandung unsur ketidakpedulian, kegagalan dalam berempati, bersimpati dan bertoleransi. Pendidikan Resolusi Konflik harus dapat menyusun kurikulum yang memiliki muatan materi upaya mencegah konflik melalui komunikasi yang humanis.

Tantangan pendidikan resolusi konflik bukan pada objek konflik tapi lebih kepada mentalitas generasi muda saat ini yang menunjukkan gejala social autism dengan ciri keterasingan individu dengan masyarakat sekitar. Generasi ini menekan sekuat mungkin kepeduliannya terhadap orang lain, dan beranggapan hidup mandiri tanpa ketergantungan dengan siapapun adalah ciri masyarakat modern. Akibatnya manusia sebagai makhluk sosial tidak lagi menjadi nilai dalam diri dan masyarakat. Kompetensi yang hilang dalam generasi saat ini adalah kemampuan bekerjasama, berinteraksi dan berkomunikasi dalam mencapai tujuan masyarakat dan negara. Padahal

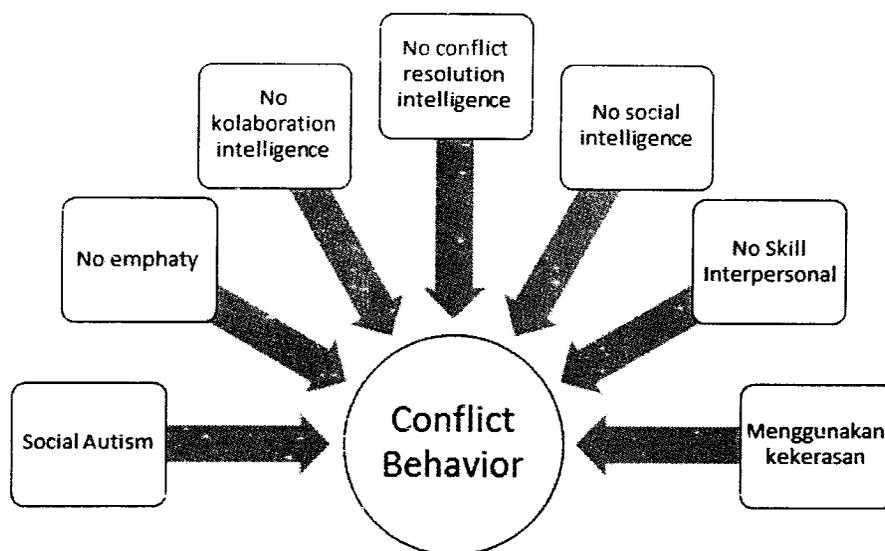
resolusi konflik membutuhkan ketiga keterampilan tersebut dalam mencegah dan mengatasi konflik.



Selain social autism, terdapat enam sikap dan perilaku konflik yang menjadi fokus untuk dirubah melalui pendidikan resolusi konflik, yakni (1) no emphaty, yakni menutup diri untuk membantu orang lain karena tidak tergugah merasakan penderitaan dan kesusahan orang lain yang membutuhkan bantuan (2) no collaborative intelligence, yakni tidak cerdas menangkap peluang kerjasama dengan pihak lain yang dapat saling menguntungkan (3) no conflict resolution intelligence, yakni pasif dan tidak tahu harus melakukan apa untuk menyelesaikan konflik (4) no social intelligence, yakni pasif dan tidak mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan masyarakat (5) no skill personal, tidak mampu membina hubungan dekat seperti persahabatan dan percintaan dengan orang lain (6) menggunakan kekerasan, yakni gagal

menahan emosi dalam menyelesaikan masalah sehingga menggunakan tindak kekerasan untuk mengalahkan pihak lawan. Berikut skema tujuh perilaku konflik:

Tujuh perilaku konflik yang menghambat resolusi konflik

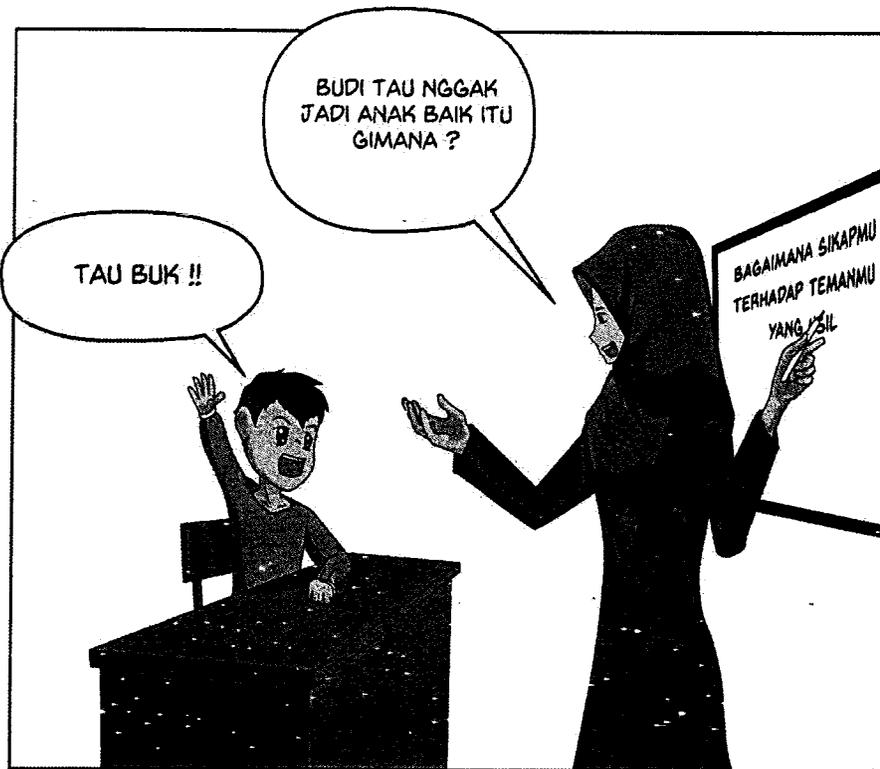


Sumber : Author

#### 4. Desain Pendidikan Resolusi Konflik

Pendidikan resolusi konflik harus dimulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi. Taman Kanak-kanak memiliki peran penting dalam membentuk sikap resolusi konflik yakni sikap yang pro-sosial. Untuk dapat memiliki sikap pro-sosial keterampilan yang harus dimiliki oleh anak TK adalah kemampuan berkomunikasi. Guru harus dapat memberi contoh kepada peserta didik bagaimana mengungkapkan perasaan marah, sedih, senang dan kecewa, menggunakan kalimat yang jelas dan sistematis. Hal ini mengantisipasi kemarahan dan emosional anak-anak dan menahan diri untuk tidak

melakukan kekerasan. Guru TK harus sesering mungkin memberi kesempatan kepada anak didiknya untuk berbicara, mengungkapkan pengalaman, perasaan dan pengetahuan yang dimilikinya.



Memasuki jenjang Sekolah Dasar (SD), guru harus mulai memberi wawasan kepada murid bahwa dalam pergaulan adakalanya harmonis dan adakalanya terjadi konflik. Inilah kesempatan Guru untuk menjelaskan bahwa konflik itu alami, natural sehingga siswa memiliki persepsi positif terhadap konflik. Guru mencontohkan kalimat apa yang akan menyinggung perasaan dan kalimat apa yang dapat membuat lawan bicara merasa senang. Pada usia SD murid mulai menyadari terdapat perbedaan antara dirinya dengan teman lain. Oleh karena itu murid SD harus dididik untuk menghargai perbedaan pendapat dan

bersikap toleran terhadap latar belakang budaya, agama, ras dan golongan.



Apabila murid telah memiliki kemampuan berkomunikasi dan memiliki sikap saling menghargai perbedaan, maka akan lebih mudah memberikan pendidikan resolusi konflik kepada anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Tugas guru berikutnya adalah mendidik para siswa untuk saling bekerjasama. Murid harus diberi tugas melaksanakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) telah menjadi wadah yang tepat, namun tentu tidak semua murid tergabung dalam kepengurusan OSIS. Sekolah harus memberi peluang setiap siswa untuk memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi

sebuah kegiatan baik berskala lokal maupun nasional untuk mendidik mereka menjadi problem solving.

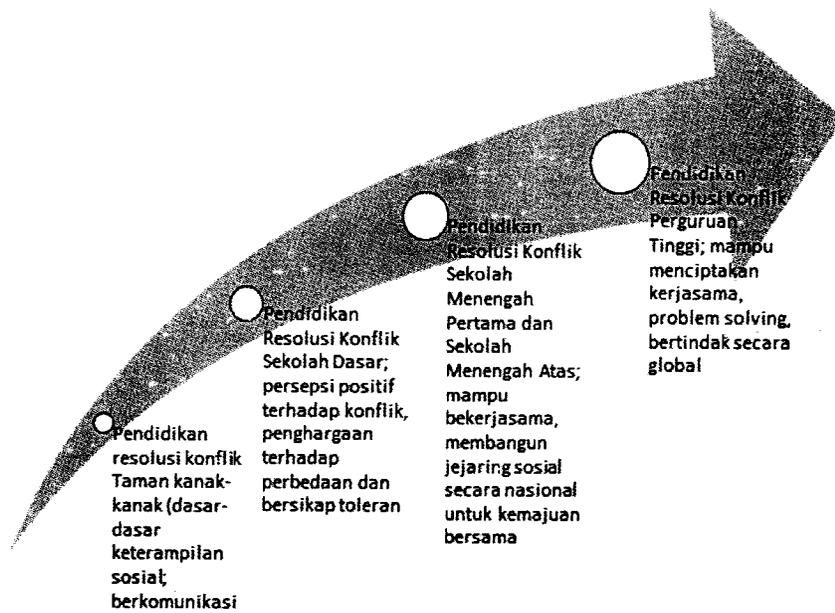


Ketika siswa sudah berada di jenjang Perguruan Tinggi, maka mahasiswa harus kreatif dan inovatif berkolaborasi dengan masyarakat dunia. Mahasiswa diarahkan oleh para dosen memahami persoalan multikultural secara global dan konflik multidimensi yang melibatkan antar negara. Mereka harus menguasai bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi, menghargai serta berkolaborasi dengan individu dan kelompok dari ras, suku, budaya, agama dan golongan yang berbeda, dengan tujuan problem solving.



Kesinambungan pendidikan resolusi konflik ini digambarkan melalui diagram capaian pembelajaran berikut:

Capaian Pembelajaran Pendidikan Resolusi Konflik  
berdasarkan Jenjang Pendidikan

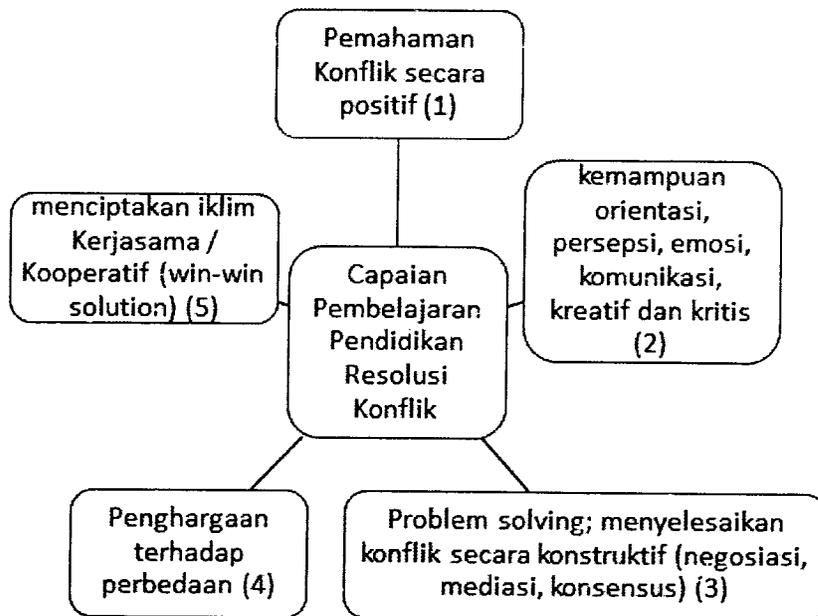


Sumber : Author

Pendidikan resolusi konflik di sekolah memiliki efek positif terhadap diri siswa, yakni dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, sikap positif terhadap sekolah, ketegasan, kerjasama, keterampilan komunikasi, hubungan antar pribadi dan antar kelompok. Sehingga siswa telah dapat mempraktekkan resolusi konflik yang dialaminya sendiri, di rumah dan di sekolah. Namun kunci utama terletak pada para pendidik, baik guru atau dosen. Mereka harus betul-betul serius dalam memberikan keterampilan interpersonal, bekerjasama, interaksi sosial, dan komunikasi interaktif, namun tetap menjunjung tinggi prinsip nilai dan moral. Berikut lima hal Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Resolusi Konflik yang harus disiapkan oleh guru dan dosen, dengan

menyesuaikan dengan level pendidikan; TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi:

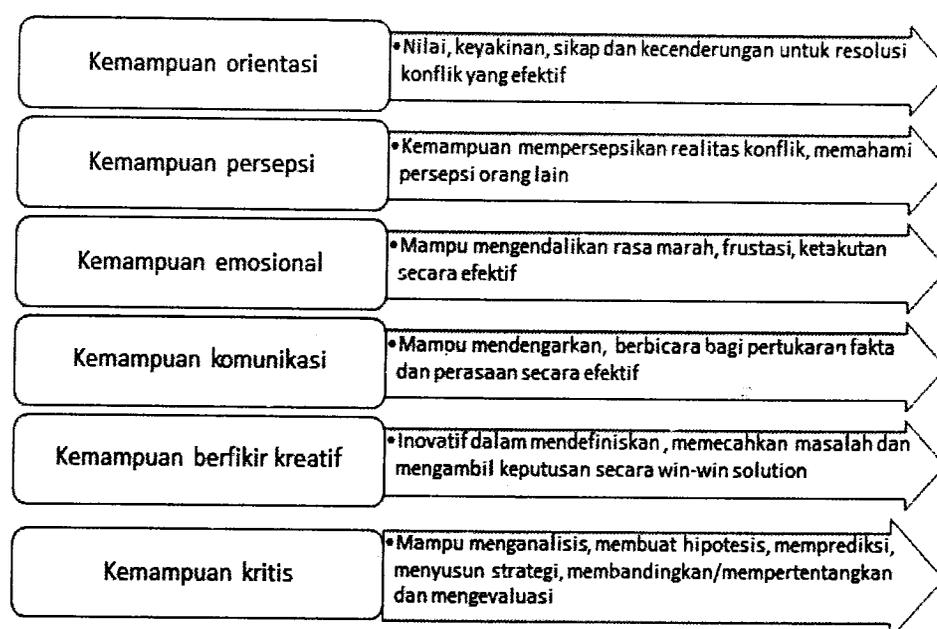
### Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Resolusi Konflik



Sumber : Author

CP pertama adalah memberi pemahaman kepada siswa bahwa konflik adalah sesuatu yang alami, bagian dari hidup. Setiap orang berupaya membebaskan diri dari konflik dengan kesediaannya untuk terbuka membicarakannya dengan orang lain. CP kedua adalah siswa memiliki kemampuan orientasi, persepsi, emosi, komunikasi, kreatif dan kritis. CP ketiga problem solving, menyelesaikan konflik secara konstruktif baik dengan mediasi, negosiasi dan konsensus. CP keempat adalah penghargaan terhadap perbedaan dan CP keilma adalah menciptakan iklim kerjasama dengan prinsip win-win solution. Khusus untuk CP kedua berikut uraiannya:

## Kemampuan soft skill resolusi konflik



Sumber : author

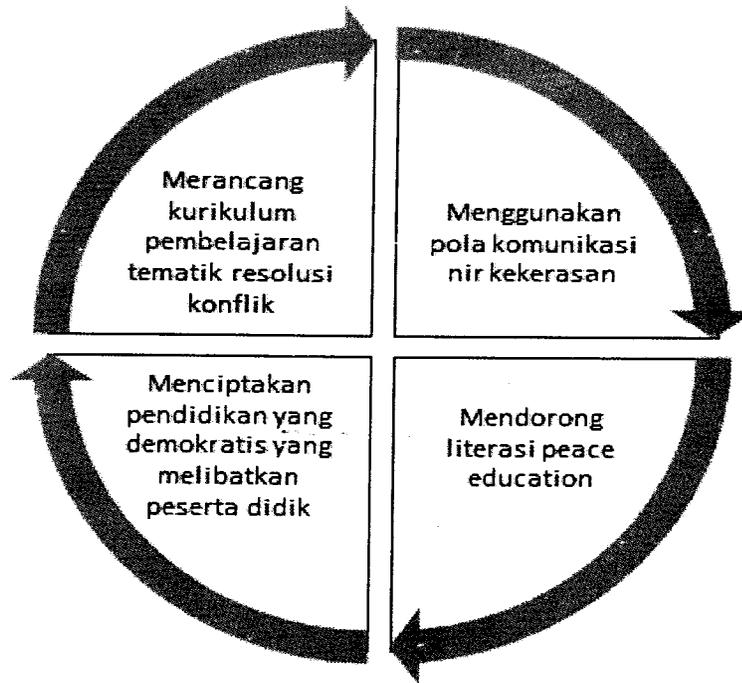
Pada saat siswa berada pada situasi konflik, diperlukan kemampuan komunikasi khusus agar konflik situasi menjadi lebih kondusif untuk melakukan resolusi konflik. Berikut 10 prinsip untuk dapat mengatasi konflik melalui komunikasi cerdas; (1) Mengatur nada suara menjadi rendah, tidak keras agar pendengar menjadi lebih tenang (2) mendengar secara sabar dan seksama seluruh informasi dari pihak yang berkonflik (3) menggunakan kata dan kalimat yang mudah dipahami (4) menggunakan perspektif pendengar (5) menjadi pendengaran yang aktif (6) fokus dengan inti permasalahan (7) perhatikan pesan yang disampaikan (8) komunikasi berkelanjutan (9) merespon komunikasi non verbal (10) memperhatikan isi/konten yang disampaikan para pihak (Nisa Jakiatin, 2015). Apabila siswa telah memiliki 10 kemampuan berkomunikasi diatas maka dia siap

menunjukkan kemampuannya sebagai problem solving. Pada tahap yang lebih tinggi, maka siswa akan memiliki pola hidup menghargai perbedaan dan keinginan untuk menciptakan hubungan sosial yang baik melalui kerjasama lokal, nasional bahkan internasional. Mampu menciptakan hubungan baik merupakan capaian tertinggi pendidikan resolusi konflik.

## 5. Penciptaan *Peace Building* di Sekolah

Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Capaian Pembelajaran merupakan aktivitas persiapan pendidikan resolusi konflik. Hal penting lainnya untuk memaksimalkan pendidikan resolusi konflik adalah menciptakan *peace building* di lingkungan sekolah melalui kebijakan atau peraturan pimpinan (Salsabila, 2017). Terdapat empat kebijakan hal yang harus disiapkan pimpinan; *pertama*, merancang kurikulum pembelajaran tematik resolusi konflik menjadi mata pelajaran atau mata kuliah wajib di sekolah. Kedua, setiap orang yang berada di lingkungan sekolah atau kampus menggunakan pola komunikasi tanpa kekerasan. Komunikasi tanpa kekerasan artinya menyampaikan maksud dan tujuan tanpa menyinggung perasaan, harkat dan martabat manusia. Ketiga, mendorong literasi peace education, dengan memperbanyak bacaan, website yang mudah diakses siswa untuk menambah wawasan resolusi konflik, keempat menciptakan pendidikan yang demokratis yang melibatkan peserta didik. Hal ini jarang dilakukan oleh sekolah maupun kampus, yakni menerima masukan dan kritik dari siswa sebagai pengguna dan klien sekolah. Hal ini dapat menciptakan kebersamaan dan kepuasan belajar mengajar di sekolah.

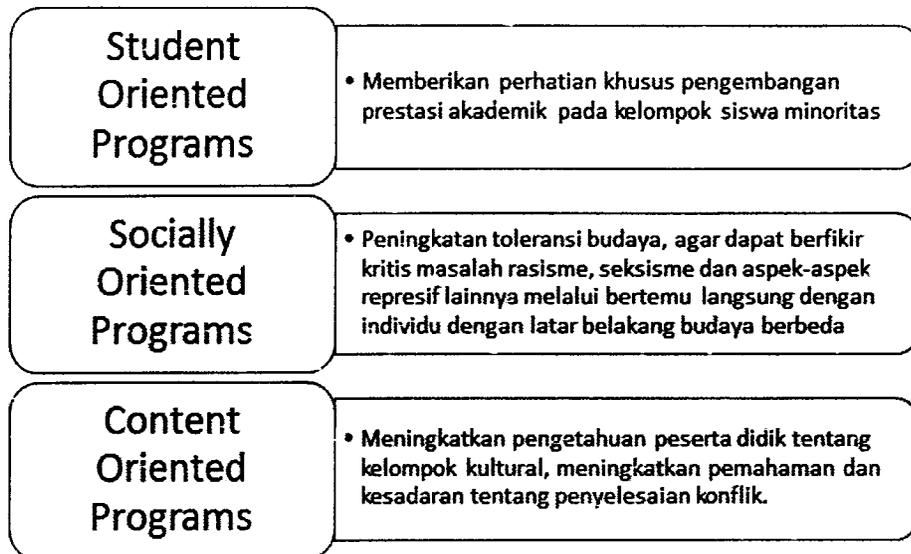
## Empat kebijakan menciptakan Peace building di sekolah



Sumber : Hasil interpretasi author dari Salsabila, 2017

Soemantri (2011) menuliskan tiga kelompok desain pendidikan multikultural yang dapat diadopsi oleh pendidikan resolusi konflik. *Pertama*, student oriented programs, yakni memberikan perhatian khusus pada pengembangan prestasi akademik pada kelompok minoritas. Hal ini berdampak pada memperkuat kepercayaan diri siswa minoritas sehingga pada akhirnya merasakan kesetaraan dalam perlakuan. *Kedua*, socially oriented program, peningkatan toleransi budaya, agar dapat berfikir kritis masalah rasisme, seksisme dan aspek-aspek represif lainnya. *Ketiga*, content oriented programs melalui meningkatkan pengetahuan tentang kelompok kultural dan upaya penyelesaian konflik. Siswa harus menyadari bahwa perbedaan adalah

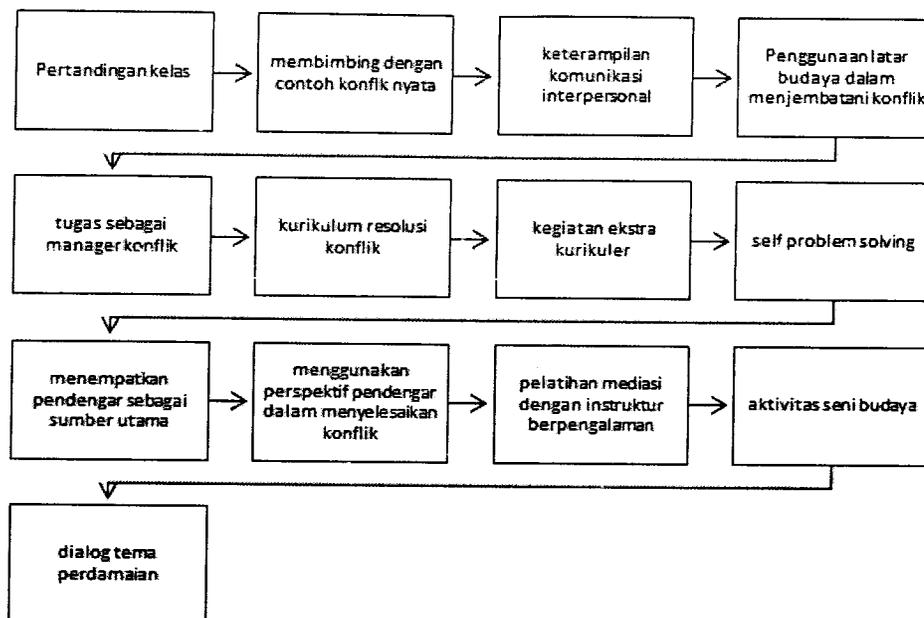
kekayaan dan anugerah Tuhan untuk hidup bersama, saling menghargai, berkembang dan bertahan hidup. Pendidikan multikultural bertujuan menciptakan kesempatan pendidikan yang sama dari berbagai keragaman kelompok masyarakat. Konsep ini bersinergi dengan pendidikan resolusi konflik (Somantrie, 2011). Berikut desain pendidikan multikultural sebagai pendidikan resolusi konflik;



Sumber : hasil interpretasi author terhadap konsep Soematrie, 2011

Beberapa program yang dapat dilakukan agar siswa memiliki keterampilan resolusi konflik digambarkan melalui bagan berikut :

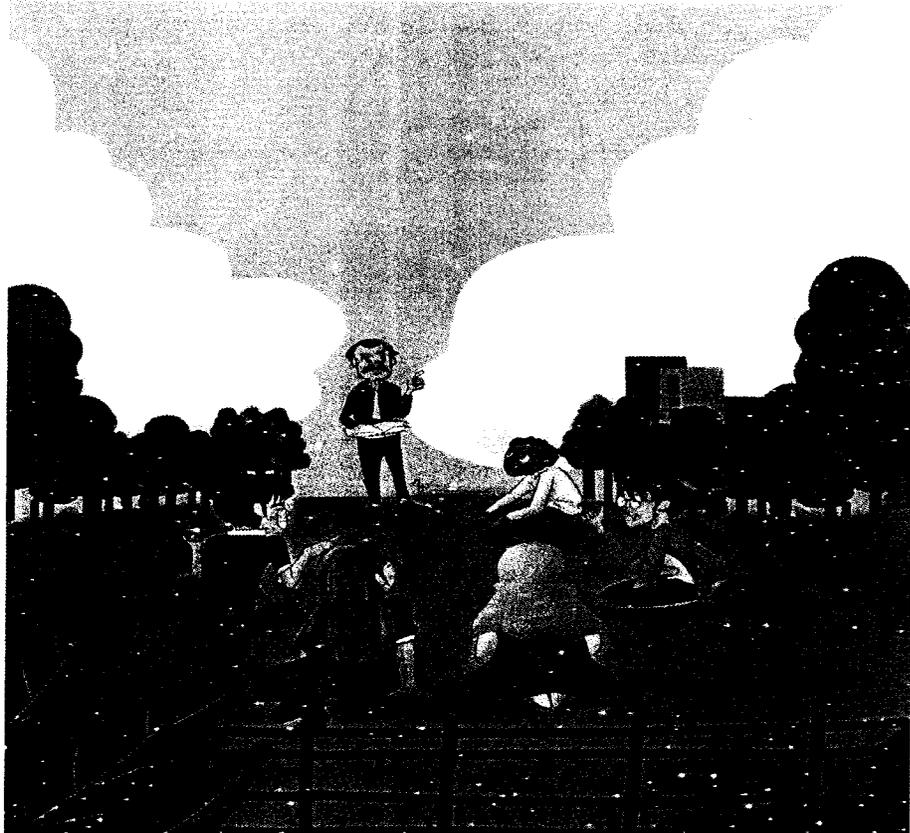
### Program pendidikan Resolusi Konflik



Sumber : Author

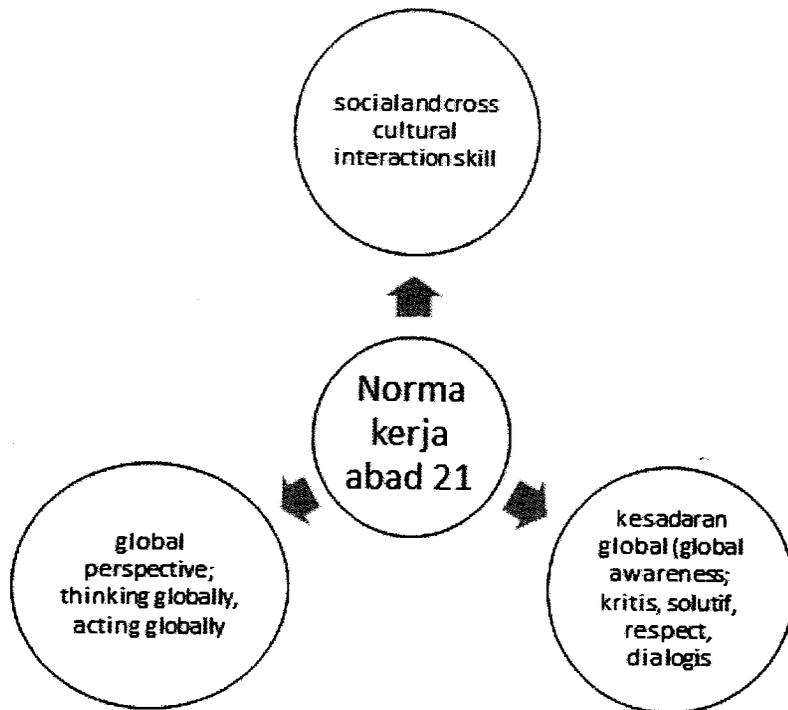
### 6. Kecerdasan Sosial dalam Pendidikan Resolusi Konflik

Pendidikan resolusi konflik adalah jawaban dari kebutuhan abad 21 yang menghendaki siswa memiliki tiga keterampilan; *pertama*, social and cross cultural interaction skill, *kedua*, kesadaran global untuk bersikap kritis, solutif, respect dan dialogis. *Ketiga*, global perspektif, yakni thinking globally acting globally. Tanpa mempersiapkan tiga keterampilan diatas, maka bangsa Indonesia hanya akan menjadi labor penelitian konflik. Untuk itu para orang tua, sekolah, masyarakat dan negara harus bersinergi menunjukkan kecerdasan sosial, agar masa depan Indonesia tampil sebagai negara harmonis dengan berbagai keragaman yang dimilikinya.



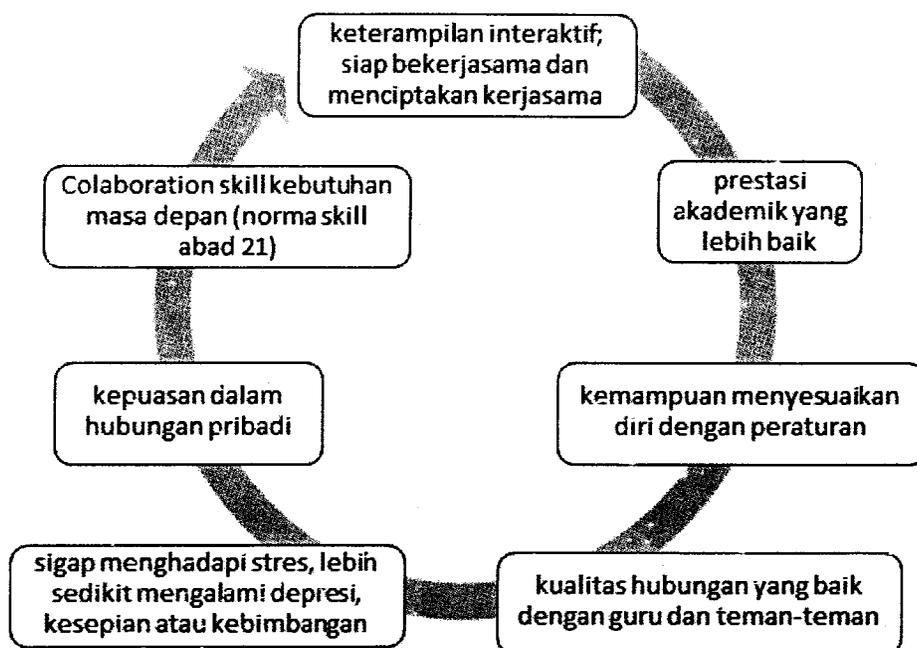
Berikut lima kecerdasan sosial yang berkorelasi dengan pendidikan resolusi konflik di sekolah:

1. Social networking, yakni sebuah kemampuan membangun jejaring sosial lintas budaya baik dilakukan antar individu, kelompok atau masyarakat. Keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun jejaring sosial adalah keterampilan saling memahami dan bekerja sama.



2. Social intelligence, yakni the ability to understand and manage men and women. Kemampuan untuk memahami maksud, motivasi, keinginan, dan perasaan orang lain. Kecerdasan ini memungkinkan seseorang berhubungan dan bekerja secara efektif dengan orang lain. Terdapat 5 dimensi; kesadaran situasi (*situational awareness*); mampu membaca situasi dan menafsirkan perilaku orang dalam situasi tertentu. Kehadiran (*presence*), yakni kemampuan menangkap kesan verbal dan non verbal seseorang. Authenticity (kejujuran/keaslian) menaikkan sinyal sehingga kesan baik, jujur, dapat dipercaya dapat ditangkap orang lain terhadap diri. Clarity, yakni kejelasan dalam menyampaikan gagasan, data, pandangan sehingga orang lain mau bekerjasama. Empathy, yakni perasaan yang sama,

keterhubungan (connectedness) dengan orang lain sebagai dasar kerjasama.



3. Social expertise; yakni the ability to perceive and make distinctions in the intentions, motivations, point of view and emotions of other people.
4. Social awareness, yakni kesadaran sosial, apa yang kita rasakan tentang orang lain, mulai dari tanggapan seketika terhadap keadaan dalam diri / perasaan orang lain, untuk menyelesaikan situasi sosial yang rumit. Kesadaran ini meliputi; empathy, penyesuaian diri (attunement), kecermatan empati (empathic accuracy) dan pengetahuan sosial (social cognition). Empathy merupakan kemampuan siap untuk merasakan perasaan (emosi) orang lain. Kemampuan ini terjadi secara cepat dan otomatis. Kemampuan berikutnya adalah penyesuaian diri (attunement)

yakni hadir secara penuh dan bertahan memfasilitasi terjadinya hubungan. Kecermatan empathy yakni keahlian inti dalam kecerdasan sosial, pemahaman yang jelas tentang apa yang orang lain rasakan dan pikirkan. Sedangkan kognisi sosial tentang kemampuan memahami bagaimana dunia sosial benar-benar bekerja. Seseorang yang cakap dalam kemampuan ini mengetahui apa yang paling diharapkan dalam situasi sosial tertentu. **Perilaku** yang pantas di tempat ibadah, bertemu dengan orang-orang terhormat, orang tua, dan sebagainya. Artinya Kognisi sosial bukan sekedar pengetahuan, tapi apa yang dilakukan ketika berinteraksi dengan orang lain.

5. Social facility, yakni kecakapan sosial, apa yang kita lakukan dengan social awareness, membangun kesadaran sosial untuk melakukan interaksi yang lancar dan efektif. Kecakapan sosial meliputi keharmonisan (synchrony), pernyataan diri (self presentation), pengaruh (influence), dan kepedulian (concern). Keharmonisan (synchrony) artinya seiring sejalan dengan gerakan nonverbal orang lain. *Self presentation* merupakan kemampuan pernyataan diri dalam suatu cara yang mengesankan. Membangkitkan emosi ke dalam diri membawa ke dalam spektrum emosi orang lain. Influence / pengaruh merupakan kemampuan menghasilkan dampak interaksi yang konstruktif, menerapkan kebijaksanaan dan pengendalian. Kepedulian (concern) kemampuan seseorang merasa terharu atau merasa kasihan kepada orang lain. Semakin besar rasa empati dan kepedulian kita kepada orang lain, semakin besar keinginan untuk membantu mereka yang membutuhkan.

## KESIMPULAN

Buku ini berhasil menggambarkan tipologi konflik sosial yang terjadi di Indonesia menjadi enam akar masalah yakni (1) Kerjasama tidak harmonis, (2) Masing-masing pihak ingin saling mengalahkan, (3) Kekerasan yang merugikan (4) Tidak memiliki keterampilan interpersonal (6) Tidak mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. Solusi untuk mengatasi akar konflik sosial ini adalah melalui Pendidikan Resolusi Konflik yang telah dimulai dari usia dini hingga Perguruan Tinggi. Desain yang ditawarkan pada tulisan ini adalah mensinergikan kurikulum, capaian pembelajaran, kebijakan, serta peran serta orang tua, masyarakat dan negara untuk menunjukkan kecerdasan sosial. Desain ini berkontribusi pada ilmu humaniora dan dapat dikembangkan terutama bagi ilmu kependidikan, psikologi, hukum, sosial dan budaya. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi awal diskusi para pengambil kebijakan di institusi pendidikan untuk meresmikan mata pelajaran Pendidikan Resolusi Konflik.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih pada Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) atas dana Penelitian Skema Penelitian Tesis Magister (PTM) 2019.

---

SUSI FITRIA DEWI  
JUNAIDI INDRAWADI  
SYAMSUDDIN ANAS  
ANDES HULFAREZA  
NOSY MUTIA ANGRAINI  
WELLA AYU NINGSIH

## DAFTAR PUSTAKA

- Adila, A. (2019). Interfaith Dialogue di komunitas Young interfaith Peacemaker Community (YPPC) Regional Surabaya berbasis Al Quran dan Al Kitab. Yogyakarta.
- Alting, H. (2011). Konflik Penguasaan Tanah Di Maluku Utara: Rakyat Versus Penguasa Dan Pengusaha. *Jurnal Konstitusi*, II(2), 266–282.
- Ayi, O., & Rusyana, Y. (2012). Building Peace generation : How The Islamic Values of Peace To Be Educated in Indonesia. *Edukasi*, 10(2), 143–160.
- Calcagno, A. (2010). Hannah Arendt and Augustine of Hippo: On the pleasure of and desire for evil. *Laval Theologique et Philosophique*, 66(2), 371–385. <https://doi.org/10.7202/044846ar>
- Collins, R. (2019). *Conflict & Geopolitical Theory*. Springer. Retrieved from [file:///D:/PhD/Courses/sociology/13296\\_Chapter\\_7\\_Web\\_Byte\\_Randall\\_Collins.pdf](file:///D:/PhD/Courses/sociology/13296_Chapter_7_Web_Byte_Randall_Collins.pdf)
- Dewi, S. F. (2006). Konflik dalam Pemerintahan Nagari : Demokrasi, V(1), 61–72.
- Dewi, S. F. (2010). Oral tradition in the study of ulayat land disputes in West Sumatra. *Wacana*, 12(1), 70–84.
- Dewi, S. F. (2013). Kearifan Lingkungan Dalam Simbol Batas Nagari. *ATMA UKM*, 1(1), 317–327.
- Dewi, S. F. (2014). Nagari Boundary Conflict in West Sumatera : A Case Study of Nagari Sumpur and Bungo Tanjung. *Scientific Journal of PPI-UKM, Social Sci*(2), 206–209.
- Dewi, S. F. (2017). *Sosiologi Politik*. (-, Ed.) (1st ed.). Yogyakarta: Gre Publishing.
- Dian Agung Wicaksono, A. P. Y. (2018). Inisiasi Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat di Kabupaten Manggarai. *Jurnal Penelitian*

Hukum De Jure, 18(2), 275–288.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.275-288>

Dicky Rachmawan. (2016). Pola Eskalasi Konflik Pembangunan Infrastruktur : Studi Kasus Pembangunan Waduk. Masyarakat Jurnal Sosiologi, 20(80), 193–211.

Dobratz, B. A. (2011). The Role of Religion in the Collective Identity of the White Racialist Movement. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 40(2), 287–301.

Eriyanti, F. (2016). “Malakok”: Multicultural Concepts Based On Local Wisdom In Minangkabau Community, (October), 15–16. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1136/971>

Furnham, A., & Allass, K. (1999). The influence of musical distraction of varying complexity on the cognitive performance of extroverts and introverts. *European Journal of Personality*, 13(1), 27–38. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-0984\(199901/02\)13:1<27::AID-PER318>3.0.CO;2-R](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0984(199901/02)13:1<27::AID-PER318>3.0.CO;2-R)

Gamin, Nugroho, B., & Kartodihardjo, H. (2014). Menyelesaikan Konflik Penguasaan kawasan Hutan Melalui Pendekatan gaya Sengketa para Pihak di Kesayyuan pengelolaan Hutan lakitan (Resolving Forest Land Tenure Conflict by Actor ' s Conflict Style Approach in Forest Management Unit of Lakitan ). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(1), 71–90.

Hafizah. (2017). Malakok sebagai Syarat Untuk Menjadi Warga Masyarakat di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam. *Jurnal Kepemimpinan San Kepengurusan Sekolah*, 2(2), 149–158.

Hidayati, A. (2017). Membangun Jembatan Interaksi mahasiswa Muslim dan Kristen. Surakarta.

Huntington, S. P. (1993). The clash of civilizations? *Foreign Affairs*, 72(3), 32–51. <https://doi.org/10.4324/9781315231372>

I Putu Prana Suta Arsadi, K. S., & Artha, R. W. (2018). e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha. E-

Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha,  
1(1).

- Indo Santalia, I. (2018). Peace building: Studi kasus Kegiatan mahabbah Institute For Peace And Goodness di Kota Makkasar. *Al Adyan*, 5(2), 235–294.
- Luthfi, M. (2018). Pengaruh Komunikasi Antar Budaya Terhadap Hubungan Harmonisasi Masyarakat Desa Tanjung Siporkis Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. *Network Media*, 1(1).
- Maftuh, B. (2010). Memperkuat Peran IPS dalam Membelajarkan Keterampilan Sosial dan Resolusi Konflik. Bandung.
- Maladi, Y. (2012). Dominasi Negara Sebagai Sumber Konflik Agraria di Indonesia. *MMH*, 41(3), 432–442.
- Malik, R. (2016). Ikatan Keekerabatan Etnis Minangkabau dalam Melestarikan Nilai Budaya Minangkabau di Perantauan sebagai Wujud Warga NKRI. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5, 17–27.
- Mantu, R. (2015). Bina damai Dalam Komunitas Pesantren : Sebuah Upaya Counter-Radikalisme. *Walisongo*, 23(1), 131–150.
- Martoyo, Ahmad Junaidi, M. I. (2017). Pemberdayaan Hukum Tanah .... *Fenomena*, 16(1), 137–160.
- Mattaro, M. M. T. mas. (2017). Alasan Encompass trust Dalam menanamkan nilai-nilai Perdamaian pada generasi Muda Internasional melalui Pendidikan multikultural. Malang.
- Mohd. Foad Sakdan. (2005). *Pengurusan Konflik*. (D. B. dan P. K. Lumpur, Ed.) (1st ed.). Selangor Darul Ehsan: Damawa Sdn. Bhd.
- Neumayer, E. (2007). An empirical Test of a neo-Malthusian theory of fertility change. LSE Research Online.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, XIII(2), 177–181.

- Nisa Jakiatin. (2015). Resolusi Konflik dalam Perspektif Komunikasi. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 2(April 2015), 17–30.
- Paramita, S., & Carissa, R. M. (2018). Inter-Ethnic Communication Barriers in Pontianak City. *Jurnal The Messenger*, 10(1), 54. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v10i1.550>
- Pettalongi, S. S. (2013). Islam Dan Pendidikan Humanis Dalam Resolusi Konflik Sosial. *Cakrawala Pendidikan*, (2), 172–182. <https://doi.org/10.21831/cp.v0i2.1474>
- Rahardjanto, A. K. (2010). Studi Pendahuluan Model Pengelolaan Sumberdaya Air Partisipatif Akomodatif Guna Antisipasi Konflik Pembagian Air. *Program Doctoral UI*, 13(2), 91–114.
- S Fisher, DI Abdi, J Ludin, R Smith, S Williams, S. W. (2000). *Mengelola konflik, keterampilan & strategi untuk bertindak.* (-, Ed.) (1st ed.). Inggris: ZED Books. Retrieved from <https://books.google.co.id/working-with-conflict-skills>
- Salsabila, U. H. (2017). Refleksi Peace Education Dalam Transformasi Kurikulum Pendidikan Islam (Solusi Alternatif Resolusi Konflik Melalui Pendidikan Formal). *Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, 6(2), 1–14.
- Somantrie, H. (2011). Konflik dalam Perspektif Pendidikan Multikultural. *Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17(6), 660–672.
- Thomson, P. L. (1999). *Doing Justice Stories of Everyday Life in disadvantages School and Neighbourhoods.* Deakin University.
- Ulya, I. (2016). Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama Di Indonesia. *Fikrah*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1663>
- Williamson, C. R. (2005). The Two Sides of de Soto: Property Rights, Land Titling, and Development. In *The annual proceedings of the wealth and well-being of nations* (pp. 95–108).

## GLOSARIUM

**Etnosentrisme** adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri.

**Gaya Sengketa** merupakan analisis terhadap aktor konflik, kepentingan dan pengaruh.

**Kapitalisme** atau Kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.

***Peace Camp Komunitas Young Interfaith*** merupakan kelompok yang mengadakan kegiatan kemping bersama untuk membangun kesepahaman antara mahasiswa muslim dan kristen Yogyakarta.

**Social Awareness** yakni kesadaran sosial, apa yang kita rasakan tentang orang lain, mulai dari tanggapan seketika terhadap keadaan dalam diri / perasaan orang lain, untuk menyelesaikan situasi sosial yang rumit.

**Social Expertise** yakni the ability to perceive and make distinctions in the intentions, motivations, point of view and emotions of other people.

**Social Facility** yakni kecakapan sosial, apa yang kita lakukan dengan social awareness, membangun kesadaran sosial untuk melakukan interaksi yang lancar dan efektif.

**Social Intelligence** yakni the ability to understand and manage men and women. Kemampuan untuk memahami maksud, motivasi, keinginan, dan perasaan orang lain.

**Social Networking** yakni sebuah kemampuan membangun jejaring sosial lintas budaya baik dilakukan antar individu, kelompok atau masyarakat.

**Stereotype** adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat

dikategorikan. Namun, **stereotype** dapat berupa prasangka positif dan juga negatif, dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif.

**Strategi Pengelolaan Pendidikan Resolusi Konflik** merupakan cara untuk menata interaksi antara dosen dan mahasiswa tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian mana yang digunakan selama proses pembelajaran.